

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah- Rakor TP2DD, Pj. Bupati Luwu Minta Optimalkan Semua Potensi Sumber PAD



Sumber gambar:

<https://mediacenter.luwukab.go.id/rakor-tp2dd-pj-bupati-luwu-minta-optimalkan-semua-potensi-sumber-pad/>

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus Monitoring dan Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 di aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Selasa (2/7/2024)

High Level Meeting atau rapat koordinasi TP2DD ini dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh, MSi bersama unsur forkopimda, para kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Luwu.

Dalam arahnya, Muh. Saleh mengharapkan perhatian serius dari seluruh Kepala OPD pengelola PAD terhadap capaian realisasi PAD terhitung tanggal 1 Januari hingga 30 Juni tahun 2024. Menurutnya, perlu adanya langkah-langkah strategis dalam percepatan penerimaan PAD, sehingga terjadi peningkatan PAD disetiap tahunnya.

“Masalah bagi kita memang terkait dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran kita ini masih bertumpu kepada dana transfer dari pusat. Ini yang harus kita dorong terus bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu. Jika sumber PAD ini bisa kita optimalkan seluruh potensi yang ada, 200 miliar pun bisa kita targetkan di tahun 2025”, tutur H. Muh. Saleh

Muh. Saleh mengingatkan, realisasi pajak dan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kepala OPD pengelola PAD. Begitu pula kepada Camat dan Kepala Desa terkait dengan PBB P2.

“Saya mengharapkan rapat monitoring dan evaluasi pertama kita di tahun anggaran 2024 ini bisa dijadikan motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja terkait dengan realisasi pajak dan Retribusi. Masih ada beberapa OPD yang capaiannya dibawa 50% hingga bulan Juni. Kepada OPD yang 100% capaiannya, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi”, kata Muh. Saleh

Dijelaskan, jika pengelolaan PAD tertib dan sesuai dengan target tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat luas terhadap pembangunan Kabupaten Luwu. Perlu ada komitmen bersama dalam merealisasikan target PAD. Untuk itu, seluruh OPD pengelola PAD, Camat, Lurah dan Kepala Desa senantiasa melakukan pemantauan terhadap kinerja para kolektor pajak dan retribusi daerah, mengintensifkan pemungutan sehingga target pendapatan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Masyarakat wajib pajak juga kini dipermudah dengan diimplementasikannya elektronifikasi transaksi. melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan Bank Sulselbar, Bank Mandiri, PT. Pos Indonesia, serta kerjasama dengan berbagai outlet ritel seperti Indomaret, dan juga melalui layanan mobile banking, pemerintah telah memperluas opsi pembayaran untuk masyarakat.

“Dengan memanfaatkan teknologi Qris, baik statis maupun dinamis, oto Qris yang melakukan pelayanan jemput bola ke kecamatan dan nantinya akan diperluas sampai ke pelosok-pelosok, semua ini kita lakukan untuk membuka pintu bagi inovasi pembayaran yang tidak hanya memudahkan masyarakat tetapi juga mendukung gerakan nasional menuju masyarakat non-tunai”, tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda, H. Sofyan Thamrin, ST menjelaskan gambaran PAD Kabupaten Luwu tahun 2024, dimana target PAD Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 159 miliar lebih, sedangkan yang baru terealisasi hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp. 27,8 miliar lebih atau sekitar 17,43%.

“Target di tahun 2024 ini kita rinci berdasarkan OPD pengelola pajak dan Retribusi. Sementara laporan penerimaan PBB-P2 tahun 2023 dimana target kita Rp.10 miliar lebih telah terealisasi 88,6% sehingga masih ada sisa tunggakan sebesar Rp.1,2 miliar lebih”, ungkap Sofyan Thamrin.

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://mediacenter.luwukab.go.id/rakor-tp2dd-pj-bupati-luwu-minta-optimalkan-semua-potensi-sumber-pad/>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.